



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Agustus 2018

Halaman: 22

Ada Puluhan Pengajuan Dispensasi Pernikahan Anak

● WAHYU SURYANA

YOGYAKARTA — Sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak digelar dilakukan Pemkab dan Pemkot di DIY. Terlebih, di Kota Yogyakarta misalnya, pengajuan dispensasi pernikahan anak semester pertama telah mendekati total tahun lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Octo Nur Arafat mengatakan, walau bukan sebuah budaya, tapi kasus pernikahan dini masih berpotensi terjadi.

Salah satunya, lanjut Octo, disebabkan kehamilan tidak diinginkan. Alasan kehamilan tidak diinginkan merupakan alasan yang paling sering dikemukakan saat pasangan mengajukan dispensasi pernikahan dini.

Tercatat ada 26 pengajuan dispensasi pernikahan anak pada semester pertama tahun ini, sementara sepanjang 2017 tercatat ada 33 dispensasi pernikahan anak," kata Octo saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Yogyakarta.

Untuk itu, ia berharap, deklarasi pencegahan perkawinan usia anak yang bakal dikuatkan Peraturan Wali Kota mampu jadi senjata yang ampuh. Terutama, dalam menekan angka dispensasi pernikahan anak.

Senada, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengaku tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota demi memperkuat gerakan pencegahan perkawinan usia anak. Ia menilai, itu jadi salah satu usaha perlindungan kepada anak.

Ia berpendapat, Peringatan HAN dilaksanakan sebagai usaha menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh dan kembang. Serta, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

"Hari Anak Nasional merupakan momentum yang penting untuk menggalang keramahan dan kepedulian terhadap anak agar anak menjadi pewaris bangsa yang berkualitas," ujar Haryadi.

Haryadi menekankan, perhatian terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama. Dimulai dari keluarga, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan serta segenap elemen masyarakat.

Untuk itu, ia berharap, anak-anak Kota Yogyakarta dapat menjadi anak yang sehat, berbakat dan aman dari pergaulan negatif. Haryadi turut berharap, semua elemen semakin giat melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2018 sendiri, Yogyakarta turut mendeklarasikan gerakan pencegahan perkawinan usia anak. Deklarasi dilakukan Forum Anak Kota Yogyakarta dan Forum Komunikasi Remaja Masjid.

Deklarasi meliputi menolak perkawinan usia anak, menolak pergaulan bebas dan segala bentuk pornografi dan Napza, dan mendukung wajib belajar 12 tahun. Itu bertujuan memberikan hak dasar anak semaksimal mungkin. ■ ed: terbitan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag 2. Dinas PMPPA 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005